

## ABSTRAK

**Muhammad Jamalluddin Noor.** 190101120612, *Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.* Pembimbing: Wiwik Agustinaningsih, M.Pd. Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci** : Implementasi, Undang - undang, Perpustakaan Umum

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai tempat untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Selatan, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dimana setiap perusahaan yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam wajib menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah sesuai dengan domisili penerbit tersebut.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan serta faktor penghambat bagi Penerbit lokal dalam menerapkan kewajiban serah simpan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan subjeknya adalah tiga orang staff ruang deposit dan satu pengelola penerbit. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. kemudian untuk analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbit dan pemilik sebuah karya di Kalimantan Selatan ini sudah menerapkan kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 2018. Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah yaitu melakukan penyuratan dan juga sosialisasi. Tetapi untuk masalah sanksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan belum menerapkannya secara maksimal. Untuk hambatan oleh penerbit lokal dalam penyerahan karya mereka ini yaitu mereka tidak mendapatkan keuntungan dari publikasi karya mereka.